



## MANAJEMEN DAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM

Received: 24<sup>th</sup> June 2015; Revised: 26<sup>th</sup> July 2015; Accepted: 27<sup>th</sup> August 2015

### Hasneli

IAIN Imam Bonjol Padang  
Email: [has\\_neli@ymail.com](mailto:has_neli@ymail.com)

**Abstrak:** Manajemen pendidikan Islam merupakan proses penerapan prinsip dan teori manajemen dalam pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan. Penerapan manajemen dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren atau universitas harus didukung sumber daya personil dan sumber daya lain yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kinerja organisasi pendidikan yang tinggi dalam rangka mencapai mutu lulusan yang handal. Menggerakkan personil ini ada unsur pemberian motivasi, mengarahkan dan memimpin agar mereka bekerjasama dengan baik dan harmonis. Penulis menfokuskan pembahasan makalah ini pada persoalan lingkungan pendidikan Islam, urgensi keikutsertaan masyarakat dan strategi yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di sekolah.

**Kata kunci:** Manajemen, Lingkungan, Pendidikan Islam

Menurut Milieu, yang dimaksud lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam ada-lah sesuatu yang ada disekeliling tempat anak melakukan adaptasi, meliputi:

1. Lingkungan alam, seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lautan, dsb.
2. Lingkungan Sosial, seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.

Ki Hajar Dewantara mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simple dan spesifik. Ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam 3 pusat lembaga pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan "Tri Pusat Pendidikan" yaitu:

1. Lingkungan keluarga
2. Lingkungan Sekolah
3. Lingkungan Organisasi pemuda atau kemasyarakatan.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama dimana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Di keluarga pula manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya.

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, karena didalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak.

Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya yang artinya: "Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka

*sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasrani”*

Berdasarkan arti hadist tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya.

Dalam hal ini Allah berfirman QS.At-Tahrim (66:6) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.....*”

Disinilah letak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, karena anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada kedua orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Keluarga dalam perspektif pendidikan Islam memiliki tempat yang sangat strategis dalam pengembangan kepribadian hidup seseorang. Baik buruknya kepribadian seseorang akan sangat tergantung pada baik buruknya pelaksanaan pendidikan Islam di keluarga.

Fungsi keluarga dalam kajian lingkungan pendidikan sebagai institusi sosial dan institusi pendidikan keagamaan.

### **Keluarga sebagai Institusi Sosial**

Orang tua berkewajiban untuk mengembangkan fitrah dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan dalam perspektif ini, tidak menempatkan anak sebagai objek yang dipaksa mengikuti nalar dan kepentingan pendidikan, tetapi pendidikan anak berarti mengembangkan potensi dasar yang dimiliki anak yang dimaksud. Dalam Islam, potensi yang dimaksud cenderung pada kebenaran. Karena ia cenderung pada kebenaran, maka orang tua dituntut untuk mengarahkannya.

Posisi keluarga seperti gambar di atas, menurut M. Noorsyam (1988:23) telah menunjukkan bahwa keluarga pada hakekatnya berperan sebagai institusi sosial. Keluarga menjadi bagian dari masyarakat dan Negara. Tanggung jawab sosial dalam keluarga, akan menjadi kesadaran bagi perwujudan masyarakat yang baik.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama. Di lingkungan ini anak akan diperkenalkan dengan kehidupan sosial. Adanya interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya menyebabkan ia menjadi bagian dari kehidupan sosial.

### **Keluarga sebagai Institusi Pendidikan/Keagamaan**

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik dan membutuhkan pendidikan. Dalam perspektif Islam, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana orang tua membantu perkembangan psikologis dan intelektual anak. Aspek ini membutuhkan kasih sayang, asuhan dan perlakuan yang baik. Termasuk yang jauh lebih penting lagi adalah peran orang tua menanamkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan anak. Model pendidikan keimanan yang diberikan orang tua kepada anak, dituntut agar lebih dapat merangsang anak dalam melakukan contoh perilaku orang tua (*uswatun hasanah*)

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah orang tua menyerahkan

tugas dan tanggung jawabnya kepada sekolah

Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan-pengatahuan, keterampilan, juga mendidik anak beragama.

Disinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah haruslah merupakan kelanjutan, setidak-tidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan dalam keluarga.

Sekolah telah membina anak tentang kecerdasan, sikap, minat, dan lain sebagainya dengan gaya dan caranya sendiri sehingga anak mentaatinya. Lingkungan yang positif adalah terhadap pendidikan Islam yaitu lingkungan sekolah yang memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama ini. Sedangkan lingkungan sekolah yang netral dan kurang menumbuhkan jiwa anak untuk gemar beramal, justru menjadikan anak jumud, picik, berwawasan sempit. Sifat dan sikap ini menghambat pertumbuhan anak. Lingkungan sekolah yang negatif terhadap pendidikan agama yaitu lingkungan sekolah berusaha keras meniadakan kepercayaan agama di kalangan anak didik.

Bagi setiap muslim yang benar-benar beriman dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam, mereka berusaha untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang diberikan pendidikan agama. Dalam hal ini mereka mengharapkan agar anak didiknya kelak memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam atau dengan kata lain berkepribadian muslim. Yang dimaksud dengan berkepribadian muslim adalah kepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah-lakunya, kegiatan jiwanya maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya.

## **Lingkungan Masyarakat**

Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.

Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini bisa dikatakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Dan anak didik secara sadar atau tidak telah mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan dan keagamaan di dalam masyarakat.

## **Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Islam**

Semua manusia dalam setiap proses perkembangannya secara umum menginginkan pendidikan. Tanpa pendidikan, potensi manusia yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang secara maksimal. Namun pendidikan formal tak dapat diharapkan menanggung transmisi keseluruhan kebudayaan bangsa. Masyarakat masih akan tetap memegang fungsi yang penting dalam pendidikan transmisi kebudayaan. Pendidikan norma-norma, sikap adat istiadat, keterampilan sosial, dan lain-lain banyak diperoleh dalam keluarga masing-masing. Proses ini diperoleh anak terutama berkat pengalamannya dalam pergaulannya dengan anggota keluarga, teman-teman sepermainan dan kelompok primer lainnya, bukan disekolah.

Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat dengan komunitas muslim dalam jumlah yang sangat besar maka dapat dimengerti bahwa jumlahnya yang besar itu, telah melahirkan berbagai potensi dalam

langkah optimalisasi pemberdayaan masyarakat Islam di negeri ini. Sebab, jika dunia pendidikan Islam mampu menggali dan memenej sumber daya manusia (SDM) yang ada pada komunitas muslim dalam peningkatan mutu pendidikan sungguh akan memberikan nilai maksimal yang dicapai oleh institusi pendidikan Islam. Adapun pemberdayaan masyarakat pada komunitas muslim ada pada; komite sekolah, cendekiawan muslim, tokoh-tokoh agama yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam, tokoh masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, dan lain-lain. Di samping itu diperlukan adanya pemikiran ke arah pemberdayaan masyarakat yang terencana dengan matang oleh umat Islam terhadap umat Islam sendiri. Sebab pendidikan Islam pada umumnya dinilai belum bisa secara memadai ikut serta dalam menanamkan atau memberdayakan masyarakat dengan nilai-nilai moral agama. Ini tampak menjadi sebuah kegelisahan social, karena mereka yang berlangsung sangat didominasi oleh proses pemberdayaan secara intelektual. Institusi pendidikan yang banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberikan kesempatan yang luas untuk mengenal kehidupan masyarakat yang sebenarnya (Nasution, 2004: 153). Karena pada hakikatnya peserta didik itu datang dan kembali kepada masyarakat. Disinilah tuntutan yang harus dilakukan oleh para pemerhati pendidikan tak terkecuali pendidikan Islam untuk memikirkan proses pemberdayaan komunitasnya.

Selama ini telah muncul beberapa pendapat yang mengkritisi pendidikan Islam di sekolah diantaranya:

1. Hasil belajar PAI belum sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
2. Pendidikan Nasional belum sepenuhnya mampu mengem-bangkan manusia Indonesia yang religius, berakhlak, berwatak kesatria dan patriotik.
3. Kegagalan pendidikan Islam disebabkan pendidikannya lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formal, dan hafalan, bukan pada pemaknaannya.
4. Pendidikan Islam lebih menekankan pada kemampuan verbalisme dan kemampuan numerik (berhitung), sementara kemampuan pengendalian diri dan penanaman keimanan diabaikan.
5. Penyampaian materi akhlak di sekolah sebatas teori, pada hal yang diperlukan adalah suasana keagamaan.
6. Permasalahan pendidikan Islam di sekolah saat ini mengalami masalah metodologi (Majid, 2005: 165).

Berdasarkan realitas tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dianalisis dan segera mendapat perhatian dari semua pihak. Menurut penulis bahwa keberhasilan pendidikan Islam sangat tergantung pada adanya proses kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan masyarakat. Untuk mengungkap pentingnya pember-dayaan masyarakat dalam pendidikan Islam itu dapat dilihat dari tiga segi yaitu: *pertama*, segi arah pemberdayaan potensi masyarakat di bidang pendidikan Islam, *kedua*, upaya-upaya pemberdayaan potensi tersebut, dan *ketiga*, manfaat pemberdayaan potensi masyarakat dibidang pendidikan. Agar lebih jelasnya dapat diuraikan masing-masingnya di bawah ini :

### **1. Arah pemberdayaan potensi masyarakat, dapat diklasifikasi pada tiga arah:**

- a. Upaya pemberdayaan potensi masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep "*Brain development*" menjelaskan bahwa system penerapan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada tiga tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan system serabut-serabut otak, yang berarti akan

berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu pemberdayaan potensi ummat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Selain itu, orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak memenuhi gizi yang proporsional, dan juga mengkondisikan agar anak mengalami proses perkembangan secara proporsional.

- b. Institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi masyarakat yang selanjutnya setelah keluarga. Menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya, baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. Pada hal pendidikan kita belum mampu melaksanakan tugas ini. Untuk itulah sudah saatnya institusi pendidikan melakukan berbagai upaya inovasi dengan landasan bahwa pemberdayaan potensi masyarakat perlu memperkecil peran cara tumbuhnya cara berpikir linier (yang masih menjadi tekanan pendidikan sekarang). Mengapa demikian sesungguhnya bumi dan seisinya selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat yang selalu tidak linier, begitu juga seharusnya konsep pendidikan Islam. Berarti untuk pemberdayaan potensi masyarakat harus selalu diarahkan kepada perkembangan kreativitas masyarakat. Agar maksud ini bisa dicapai, maka kemampuan . keterampilan dan seni harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan (Djohar, 2003: 134-135). Kurikulum di sekolah harus mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan di masyarakat dan dengan demikian peserta didik akan lebih memahami kondisi masyarakat. Sekolah janganlah terisolasi dari masyarakat, apa yang dipelajari hendaknya berguna bagi kehidupan peserta didik dalam masyarakat dan didasarkan atas masalah

masyarakat. Dengan demikian peserta didik akan lebih serasi dipersiapkan sebagai warga masyarakat (Nasution, 2004: 154).

- c. Arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Hubungannya proses pendidikan selama ini sikap masyarakat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah, tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu, ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian, bahkan sepatu seragam sekolah. Ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut andil dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Disinilah sesungguhnya letak pemberdayaan masing-masing potensi masyarakat (keluarga, sekolah, dan masyarakat) untuk bersama-sama mengkompromikan bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang akan diterapkan.

Dalam penanganan proses pemberdayaan potensi masyarakat ini pihak sekolah harus membu-tuhkan strategi yang tepat, dan memerlukan jaringan yang luas, melibatkan banyak pihak baik kalangan birokrat, kalangan usahawan, kalangan pemuka agama, dan tentunya kalangan pendidikan serta organisasi-organisasi kemasya-rakatan.

## **2. Upaya pemberdayaan potensi masyarakat dalam pendidikan Islam**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 sampai 11 tentang hak dan kewajiban warga negara,

orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan (UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2009: 65-66). Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang, masyarakat dan pemerintah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pemberdayaan potensi masyarakat dalam bentuk kerjasama dalam penerapan pembelajaran pendidikan Islam berikut ini:

- a. Orang tua peserta didik selama ini kurang memperhatikan perkembangan sekolah, karena pihak sekolah selalu memberikan aturan yang membatasi gerak mereka. Sudah saatnya orang tua peserta didik menjadi salah satu bagian dari aktivitas pemberdayaan potensi masyarakat yang harus dibina, dengan usaha-usaha melibatkan orang tua secara intens dengan kegiatan-kegiatan sekolah.
- b. Kurikulum pendidikan Islam selama ini hanya milik sekolah, sudah seharusnya dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan unsure lain yang dianggap perlu) sehingga belajar bukan untuk sekolah, tetapi belajar untuk hidup. Sifat kurikulum tidak baku tetapi selalu mengalami pembauran sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pendidikan saat ini. Disinilah peran orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi suatu yang sangat diharapkan.
- c. Jika kurikulum sudah terbentuk, maka masyarakat melakukan kegiatan yang dapat dikontrol benar salahnya, baik dan tidaknya, dalam bentuk kerjasama informasi individual. Proses kerjasama ini lebih didasarkan pada faktor rasa kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan akan pentingnya keberhasilan pendidikan. Aspek orang tua yang menjadi sasaran penting dalam hal ini karena keberhasilan pendidikan merupakan keberhasilan bagi anaknya, dan juga bagi orang tua tersebut.

- d. Usaha institusi pendidikan dalam menumbuhkembangkan potensi masyarakat dalam bentuk formal organisatoris, dalam bentuk pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala. Tujuan yang hendak dicapai diantaranya, *satu*, bagaimana masyarakat menyikapi proses pendidikan dengan kejadian-kejadian dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. *Kedua*, sebagai tindakan evaluasi terhadap program penerapan kurikulum yang telah disusun secara terpadu.
- e. Membangun iklim sekolah yang efektif. Iklim sekolah dapat dibina dan dikembangkan menuju kepada situasi yang kondusif dalam upaya mencapai sekolah efektif khusus dalam penerapan pendidikan Islam harus ada pola kerjasama (antara guru sekolah agama dengan guru mata pelajaran lainnya) dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah tersebut. Pada bagian ini menjadi tugas manajer sekolah untuk menerapkan system pembelajaran agama yang integral, dalam artian seluruh tenaga pengajar harus mendukung dan menerapkan system pembelajaran yang agamis. Dengan pemberdayaan seperti inilah pendidikan Islam akan semakin bercahaya di tengah-tengah masyarakat.

### **3. Manfaat pemberdayaan potensi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah:**

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan pemahaman terhadap masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh sekolah.
- b. Untuk menilai program sekolah apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

- c. Untuk mempersatukan orang tua murid dan pihak sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik.
- d. Untuk membangun keasdran kepada manusia pihak akan pentingnya pendidikan.
- e. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap sekolah.
- f. Agar masyarakat mengetahui dan memahami betapa beratnya tugas institusi pendidikan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama.
- g. Untuk mengerahkan bantuan dan dukungan dalam pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Dengan adanya usaha pemberdayaan potensi masyarakat melalui mekanisme yang telah disepakati dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap terwujudnya pendidikan yang mem-berdayakan masyarakat untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara kreatif dan inovatif.

#### 4. Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Perubahan

Lembaga pendidikan Islam saat ini masih sedang menghadapi berbagai tantangan berat, diantaranya arus globalisasi baik di bidang kapital, budaya, etika maupun moral. Dalam kontek pendidikan, mun-culnya pemalsuan ijazah, plagiasi, tradisi nyontek dikalangan siswa atau mahasiswa, atau yang lainnya merupakan indikator dari rendahnya sikap amanah.

Fenomena yang semacam itu merupakan tantangan yang perlu segera di jawab oleh lembaga pendidikan Islam, dalam arti apa kontribusinya dalam membangun masyarakat yang memiliki

sikap amanah yang tinggi tersebut di masa depan. Apakah yang dapat di perbuat para siswa atau mahasiswa sebagai generasi penerus untuk terwujudnya masyarakat madani, yakni masyarakat yang memiliki pribadi-pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia yang dapat berdiri sendiri dan dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki sikap amanah (Muhaimin, 2006: 85).

Oleh sebab itu, para pengelola lembaga pendidikan Islam perlu merenungkan kembali firman Allah dalam Q.S. al-Hasyr (59:18) berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri (individu) malakukan *nazhar* (memperhatikan) terhadap segala sesuatu (ide, konsep atau rencana kerja) yang telah diperbuatnya (diajukan atau ditawarkan) untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap prestasi kerjamu”.

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa sebelum perintah melakukan *nazhar*, ada kalimat *ittaquallah* (bertakwalah kepada Allah), demikian pula sesudahnya, yaitu *wattaquallah*. Ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan *nazhar* sebenarnya manusia sudah disuruh menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan negatif, namun manusia masih disuruh untuk melakukan *nazhar*. Melakukan penilaian secara cermat dan akurat terhadap proses dan hasil kerja sebelumnya, atau bahkan melakukan perubahan pandangan (cara pandang) dan cara penalaran karena tantangan-tantangan yang dihadapinya kedepan jauh berbeda dengan periode sebelumnya, sehingga dapat melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan terhadap sisi-sisi yang dianggap kurang baik, guna melangkah ke depan yang lebih baik.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi *fitrah* manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Ia dapat menfungsikan dirinya sebagai hamba yang siap menjalankan risalah yang dibebankan kepadanya yakni sebagai khalifah di muka bumi. Pernyataan tersebut dapat ditelusuri dalam beberapa ayat dalam al-Quran, di antaranya: Q.S. Asy-Syams (91: 8), Q.S. Adz-Dzariyat (51: 56). Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, berfikir dan berkarya, sehat, kuat dan berketerampilan tinggi untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya.

Hakikat pendidikan Islam seharusnya melahirkan generasi yang menguasai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Demikian juga dengan tujuan pendidikan Islam, yakni untuk membentuk watak atau karakter generasi muda dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menjalankan misi dan fungsinya sebagai anak manusia dan anak bangsa serta sebagai hambaNya yang bertakwa.

Seharusnya pendidikan Islam melahirkan generasi yang mampu menghadapi era global. Untuk menghadapinya, setidaknya mereka memiliki lima kemampuan di bawah ini :

1. Kemampuan belajar, mendidik dan melatih anak didik agar selalu terbiasa dan terampil belajar. Dengan kemampuan ini, arus informasi dan perubahan yang salalu dan kerap terjadi di era global ini akan dapat diantisipasi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, UNESCO memberikan empat dasar pijakan yaitu: a) *Learning to think*, b) *Learning to know*, c) *Learning to do*, dan d) *Learning to live together*.

2. Kemampuan melakukan penelitian secara eksploratif, kritis, inovatif dan kreatif.
3. Kemampuan membangun jaringan kerjasama (*networking*).
4. Kemampuan beradaptasi dengan keanekaragaman budaya.
5. Berpegang teguh pada nilai dan prinsip.

Jika dipelajari secara mendalam berbagai ayat dalam kitab suci al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Saba', surat al-Mulk, dan sebagainya, maka dapat ditemukan perintah atau ajakan Allah untuk berpikir secara kritis dan analitis tentang ciptaan Allah dilangit dan dikawasan planet dengan kandungan isi kekayaannya. Dalam ayat 10 surat Saba' [34], menceritakan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Daud tentang teknik mengecor besi. Dalam ayat 12 – 13 pada surat yang sama menceritakan tentang kemampuan Nabi Sulaiman menaklukkan angin sehingga ia mampu menempuh perjalanan yang melebihi kecepatan angin. Allah juga telah menjabarkan berbagai model teknologi pembuatan pesawat terbang dengan meniru pola atau rancang bangun struktur burung yang terbang di angkasa, sebagaimana diungkap dalam Q.S. al-Mulk 67: 19) (Arifin, 2008: 45).

## **5. Menggalang Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat dalam Mengelola Pendidikan Islam**

Partisipasi merupakan suatu term yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan (Imron, 2008: 80).

Di Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, diyakini bahwa pemerintahan dibuat dari, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-sanaan-kebijaksanaan



negaranya, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan sudah merupakan satu keniscayaan.

Selain alasan demokrasi, kebijaksanaan pendidikan tersebut secara kongkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, justru memperkuat pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Sekolah merupakan sub sistem dari sistem sosial. Karena itu, sekolah atau madrasah tidak memisahkan diri atau terasing dari masyarakatnya. Bagaimanapun, masukan siswa dan dana adalah berasal dari masyarakat. Lebih dari itu di satu sisi sekolah memerlukan masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dari masyarakat baik berupa calon murid maupun pembiayaan dalam melaksanakan program sekolah. Di lain pihak masyarakat memerlukan sekolah sebagai lembaga pelayanan jasa untuk mendapatkan program yang baik sesuai yang diinginkan.

Depdiknas dalam Syafaruddin menjelaskan bahwa prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif (Syafaruddin, 2005: 272). Jalinan kerjasama akan berlangsung baik, manakala pimpinan lembaga pendidikan Islam proaktif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola institusi yang menjadi tanggung jawabnya. Karena aktivitas lembaga pendidikan Islam

berkaitan dengan kelangsungan generasi suatu kelompok masyarakat di masa depan.

Sutisna dalam Syafaruddin (2005: 272) menambahkan, jika orang tua murid dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan yang berarti kepada program sekolah, maka administrator sekolah berkewajiban menyampaikan informasi tentang sekolah baik berupa fakta, pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan, saran dan sebagainya kepada mereka. Maka dengan demikian sekolah, madrasah dan pesantren dapat menfungsikan komunikasi eksternal dengan masyarakat. Berbagai informasi tentang lembaga pendidikan yang dipimpin, baik program kurikulum, visi, misi metode pembelajaran baru, perkembangan sarana prasarana dan fasilitas, serta prestasi akademik perlu dikomunikasikan melalui berbagai media; pertemuan, rapat, bazar, perlombaan kerjasama dunia usaha.

Sutisna dalam sumber yang sama Syafaruddin menjelaskan beberapa format program pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu: 1) Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran dari sekolah, 2) Untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan yang terpenuhi, 3) Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, 4) Untuk mengembangkan kesadaran tentang pendidikan sekolah dalam era pembangunan, 5) Untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, 6) Untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pekerjaan sekolah, dan 7) Untuk menggerakkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah (Syafaruddin, 2005: 273).

Departemen Pendidikan Nasional dalam Syafaruddin (2005: 273), menjelaskan beberapa cara dalam mengefektifkan komunikasi lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat, yaitu: a) Mengidentifikasi orang-orang

kunci (orang tua siswa yang dituakan atau *informal leaders*, pejabat, tokoh bisnis, dan profesi lainnya), b) Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya, c) Melihat saat yang tepat dalam melibatkan tokoh kunci bagi dukungan program sekolah.

Salah satu bagian dari aktivitas manajemen hubungan dengan masyarakat yang harus dibina adalah usaha-usaha melibatkan orang tua secara intens dengan kegiatan sekolah, madrasah atau pesantren. Menurut Moedjiarton dalam Syafaruddin, sekolah yang termasuk kategori unggul, selalu melibatkan orang tua dalam mencapai tujuan sekolah. Orang tua murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenali sekolah, bukan saja bentuk fisiknya, tetapi juga program sekolah.

Untuk itu sebenarnya lembaga pendidikan Islam (sekolah, madrasah, dan pesantren) tidak hanya memerlukan tokoh kunci dalam mendukung program pengembangan kelembagaan, tetapi harus diupayakan keterlibatan masyarakat untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam. Adapun upaya-upaya tersebut terdiri dari, yaitu: a) Melaksanakan program-program kemasyarakatan (kebersihan lingkungan, kelancaran lalu lintas di sekitar sekolah, bantuan sosial, dan kesehatan), b) Mengadakan *open house* untuk memeberikan kesempatan luas bagi masyarakat mengetahui program sekolah, c) Mengadakan bulletin sekolah atau majalah atau lembaran informasi secara berkala yang memuat program sekolah yang dilaksanakan, d) Mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah, e) Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam hari-hari nasional dan keagamaan (Syafaruddin, 2005: 274).

Setiap kebijaksanaan pendidikan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijaksanaan, umumnya mendapat respon dari masyarakat.

Meskipun mungkin suatu kebijaksanaan tidak didukung oleh sebagian masyarakat tetapi harus disadari bahwa sebagian masyarakat lainnya pasti ada yg mendukung. Sungguhpun demikian, pembuat dan pelaksana kebijaksanaan haruslah senantiasa berusaha agar kebijaksanaan yg digulirkan tadi, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat terutama dalam hal pelaksanaannya. Untuk itu dilakukan beberapa upaya berikut ini (Imron, 2008: 82):

1. Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dapat berupa hukuman, denda dan kerugian-kerugian yang diderita oleh pelanggar.
2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi.
3. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang di laksanakan justru akan menguntungkan masyarakat itu sendiri.
4. Menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
5. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
6. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai pengikut banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan.
7. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu di yakinkan bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.
8. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Pada dasarnya kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat itu bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.
2. Meningkatkan pemahaman tentang keadaan dan aspirasi masyarakat terhadap sekolah.
3. Menggalang usaha orang tua dan guru dalam memenuhi kebutuhan siswa, serta meningkatkan bantuan orang tua terhadap pendidikan di sekolah baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan pendidikan atau sekolah dalam pembangunan.
5. Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat untuk dapat membantu sekolah, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh sekolah.
6. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai hal-hal yang mungkin dikembangkan sekolah terhadap kepentingan masyarakat.
7. Mengusahakan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan program sekolah.
8. Saling membantu dan saling mengisi tentang perkembangan kecerdasan dan hasil belajar anak.
9. Sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lainnya melalui SPP atau BP3.
- 10 Sekolah dan orang tua secara bersama-sama berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar susila dan norma-norma agama (Asnawir, 2005: 342-343).

BP3 yang beranggotakan orang tua murid, guru dan tokoh-tokoh masyarakat bukan hanya organisasi pencari dana saja, akan tetapi sebagai organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan siswa dalam berbagai segi baik moral, prestasi maupun nilai-nilai budaya.

### **Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam**

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan ditingkat manajemen sekolah dengan memberdayakan Komite Sekolah dan membangun Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) di sekolah. Penguasaan Komite Sekolah sejajar dengan pemikiran terkini yang tidak lagi berfokus tentang *School Based Management*, namun meningkatkan keefektifan SBM. Metode yang dikembangkan adalah mengembangkan kontrol dari komunitas sekolah di dalam manajemen sekolah.

Manajemen sekolah yang ber-Tata-Kelola yang baik (*Good Governance*) adalah manajemen sekolah yang mampu menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban dari para partisipan di dalam proses pendidikan, khususnya antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Pemberdayaan komite sekolah merupakan pilihan yang efektif (Nugroho, 2008: 133).

Terkait dengan pemberdayaan komite sekolah tersebut, maka semua lembaga pendidikan Islam perlu memantapkan fungsi dan memberdayakan komite sekolah atau majelis madrasah sebagai wahana penghubung dengan masyarakat. Keberadaan komite sekolah atau majelis madrasah mengaktifkan kewenangan dan komunikasinya dalam meningkatkan keuangan sekolah (SPP/DPP) sehingga dapat ditambah sarana prasarana dan fasilitas baru untuk mendukung program unggulan yang dikembangkan pimpinan setiap lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam diperlukan adanya peran dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002, bahwa Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten/Kota, sedangkan Komite Sekolah berkedudukan di sekolah. Dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang

peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk lebih jelasnya masing-masing peran tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

#### 1. Peran Dewan Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, maka Dewan Pendidikan berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung baik finansial maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan masyarakat (Syafaruddin, 2005: 275-276).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional juga menjelaskan tentang tujuan Dewan Pendidikan, (Syafaruddin, 2005: 275) yaitu:

- a. Mewadahi dan menyelurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari selur-ruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu

#### 2. Peran Komite Sekolah

Seperti hal Dewan Pendidikan, keberadaan Komite Sekolah juga diarahkan pada peranan pemberdayaan pendidikan khususnya satuan pendidikan setingkat sekolah. Menurut Asnawir (2005:345), Komite Sekolah melaksanakan beberapa peranan penting sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advosory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial dan pemikiran, maupun yang berwujud finansial dan pemikiran, maupun yang berwujud tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) yang merupakan kegiatan pengawasan dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk itu hanya dengan kerjasama yang baik antara sekolah, madrasah dan pesantren akan dapat memanfaatkan keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Majelis Madrasah dalam mempercepat pemberdayaan lembaga pendidikan Islam. Intinya adalah meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal masing-masing pimpinan lembaga pendidikan Islam, komunikasi eksternal sehingga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Majelis Madrasah semakin memahami aspirasi kependidikan yang berkembang saat ini.

Perlu ditambahkan bahwa hanya dengan kepemimpinan yang baik dan efektif yang memungkinkan masyarakat puas terhadap program yang ditawarkan, para personil memiliki kepuasan kerja, dan organisasi berkembang dengan cepat, lulusan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik dan memiliki kepribadian utama (Syafaruddin, 2005: 275).

Asnawir (2005: 345) menyebutkan, akhir-akhir ini peranan BP3 digantikan oleh peranan Komite Sekolah. Komite Sekolah tersebut didirikan dengan tujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan disatuan pendidikan.

- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, serta bersifat demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Untuk itu hanya dengan kerjasama yang baik antara sekolah, madrasah dan pesantren akan dapat memanfaatkan keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Majelis Madrasah dalam mempercepat pemberdayaan lembaga pendidikan Islam. Intinya adalah meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal masing-masing pimpinan lembaga pendidikan Islam, komunikasi eksternal sehingga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Majelis Madrasah semakin memahami aspirasi kependidikan yang berkembang saat ini.

Perlu ditambahkan bahwa hanya dengan kepemimpinan yang baik dan efektif yang memungkinkan masyarakat puas terhadap program yang ditawarkan, para personil memiliki kepuasan kerja, dan organisasi berkembang dengan cepat, lulusan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik dan memiliki kepribadian utama (Syafaruddin, 2005: 275).

Di lain pihak Komite Sekolah juga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik secara perorangan, maupun dunia usaha dan dunia industri serta pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan memberikan reko-mendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Pendidikan Sekolah (RAPBS)
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
  - 4) Kriteria fasilitas pendidikan
  - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong tua dan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Asnawir, 2005: 346-347).

## SIMPULAN

Manajemen yang baik merupakan hal yang esensial bagi semua sumber daya yang ada untuk dapat difungsikan dan memberi pengaruh yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara institusi pendidikan dengan masyarakat. Oleh sebab itu paradigma pembelajaran harusnya berpegang pada prinsip "Belajar bukan untuk sekolah, tetapi belajar untuk hidup", karena pada hakekatnya siswa datang dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat.

Pendidikan Islam seharusnya melahirkan generasi yang mampu menghadapi era yang dinamis dan selalu berubah. Untuk meng-hadapinya, setidaknya mereka memiliki lima kemampuan yakni: 1) Kemampuan belajar, mendidik dan melatih anak didik agar selalu terbiasa dan terampil belajar agar dapat menyaring perubahan yang terjadi. Untuk itu ada empat dasar pijakan yaitu: a) *Learning to think*, b) *Learning to*

*know*, c) *Learning to do*, dan d) *Learning to live together*. 2) Kemampuan melakukan penelitian secara eksploratif, kritis, inovatif dan kreatif. 3) Kemampuan membangun jaringan kerjasama (*networking*). 4) Kemampuan beradaptasi dengan keanekaragaman budaya. 5) Ber-pegang teguh pada nilai dan prinsip.

Salah satu bagian dari aktivitas manajemen hubungan dengan masyarakat yang harus dibina adalah usaha-usaha melibatkan orang tua secara intens dengan kegiatan sekolah, madrasah atau pesantren. Di samping itu juga diupayakan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam mendukung program pengembangan kelem-bagaan

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Muzayyin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Asnawir, *Administrasi Pendidikan*, (Padang, IAIN Press, 2005)
- Djohar, *Pendidikan Strategij Alternatif Untuk Masa Depan*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003)
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia : Proses, produk dan masa depannya*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008)
- Majid, Abdul, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2009)